

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, L. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik," 2004, 140–44.
- Aminah, S., Roikan (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur: Kencana.
- Budiardjo, Prof. Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Levine P. David-Caporaso A James, 2018. *Teori Pendekatan Ekonomi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bunker, Douglas R. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB" 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Caporaso, J.A., Levine, D.P (2018). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dalam, Koperasi, and Sistem Perekonomian. *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, n.d.
- Dunn, William N. (2003) "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*" Yogyakarta; Gadjah Mada University Press
- Guntur, Andi Cudai Nur Muhammad. "Analisis Kebijakan Publik." *Analisis Kebijakan Publik*, no. April (2021): 165.
- Hayat, Hayat, and Universitas Islam Malang. "Buku Kebijakan Publik," no. September 2018 (2019).
- Kasmad, Rulinawaty, and Universitas Terbuka. "Implementasi Kebijakan Publik," no. September (2018).

Dr. Drs. Chazali H. Situmorang; M.Sc “Kebijakan Publik.Pdf,” 2016.

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung: CV Alfabeta.

### **Jurnal dan Skripsi**

Santika, A. (2000) Koperasi Unik dan Memberikan Dampak Baik Bagi Perekonomian Nasional, Jawa Tengah. *Jurnal ekonomi*, 4, 207-220.

Haeruman, S. (2004) Peraturan Koperasi Perlu Dukungan dan Implementasi yang Terarah, Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Politik*. 3(2), 14-18.

Andrias Ali, M. (2005) Penanaman Modal Asing dan Kesejahteraan Buruh Studi Hubungan Kerja Pengusaha dan Buruh Di PT. Royal Korindah Kabuoeten Purbalingga, skripsi Ekonomi Politik. hal. 183-237.

### **Lain-lain**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017  
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi

Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019

Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018

**Internet:**

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah koperasi dan umkm (2021).

[Diakses pada 23 Mei 2023. [Https://kompas.go.id](https://kompas.go.id)